
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PEMERINTAH SEBELUM DAN SAAT COVID-19 PADA WEBSITE PEMDA DI KAWASAN INDONESIA TIMUR

Imam Osama Umasangaji

Universitas Khairun

imamsngji23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemerintah sebelum dan saat covid-19 pada website pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur. Penelitian ini memakai analisis konten dengan menggunakan indikator untuk mengukur penerapan akuntabilitas dan transparansi pada website pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur, sedangkan metode pengambilan data menggunakan metode dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan uji wilcoxon signed rank test menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat akuntabilitas dan transparansi pada website pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemerintah sebelum dan saat covid-19 pada website pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur. Nilai menunjukkan rata-rata Provinsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dengan semakin lengkapnya laporan anggaran yang dipublikasi pada website pemerintah daerah pada tiga tahun semenjak ditetapkannya pandemi covid-19. Namun terdapat juga Provinsi yang justru mengalami penurunan nilai karena laporan anggaran yang dipublikasi justru kurang lengkap dibandingkan sebelum pandemi covid-19.

Kata kunci : Akuntabilitas; Transparansi; Anggaran; Pemerintah Daerah; Covid-19

Abstract

This research aims to find out how the accountability and transparency of government budgets differ before and during Covid-19 on regional government websites in the Eastern Indonesia region. This research uses content analysis using indicators to measure the implementation of accountability and transparency on regional government websites in the Eastern Indonesia region, while the data collection method uses the documentation method. The collected data was then carried out with a Wilcoxon single rank test using SPSS to find out whether there were differences in the level of accountability and transparency on regional government websites in the Eastern Indonesia region. The results of the research conducted show that there are differences in the value of accountability and transparency of the Government budget before and during Covid-19 on regional government websites in the Eastern Indonesia region. The value shows that the provincial average has increased quite significantly, this can be seen from the increasingly complete budget reports published on the regional government website in the three years since the Covid-19 pandemic was declared. However, there are also provinces that actually experience a decrease in value because the published budget reports are less complete than before the Covid-19 pandemic.

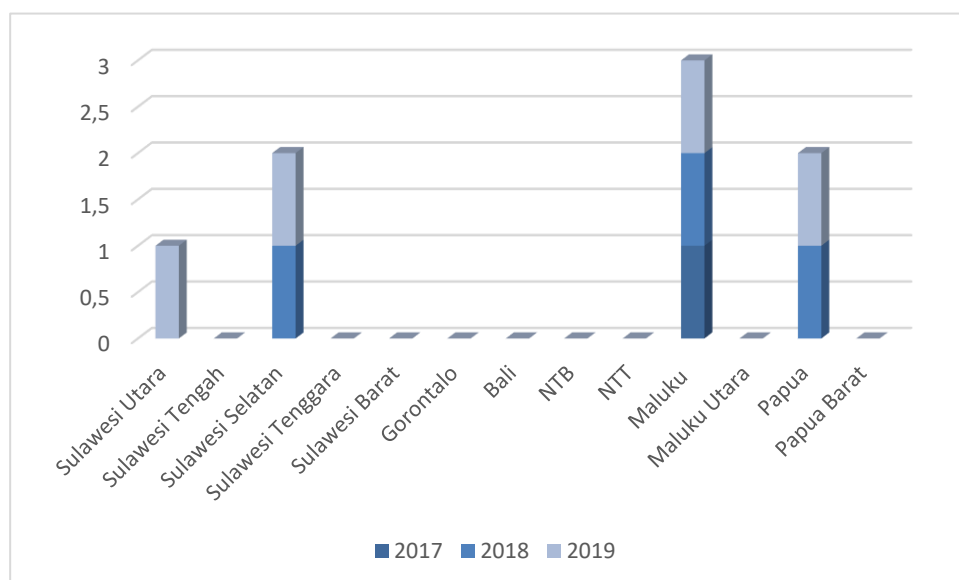
Keywords: Accountability; Transparency; Budget; Local government; Covid-19

PENDAHULUAN

Pada 2 Maret 2020, kasus Covid-19 pertama kali teridentifikasi di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari website SATGAS Covid-19 tercatat hingga tahun 2023 terdapat 6 juta kasus dan telah memakan korban jiwa 161 ribu jiwa (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2023). Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah membuat pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga pada sektor ekonomi (Shahib et al., 2022). Saat terjadinya pandemi Covid-19 tentu hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian dan negara perlu memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik bertujuan agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera selama pandemi melanda. Dengan meningkatnya tuntutan untuk pengelolaan keuangan yang baik, tentu pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat meminimalisir tindak kecurangan dalam pemerintahan khususnya pada laporan keuangan.

Akuntabilitas merupakan salah satu azas tata kelola yang penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan program yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, transparansi merupakan salah satu bagian penting dari akuntabilitas Pemerintah. Transparansi menjelaskan mengenai aturan, rencana, proses, dan implementasi, sehingga dapat diketahui point-point mengapa, bagaimana dan berapa banyak. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan jika transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Aziiz & Prastiti, 2019; Muis, 2020; Overman et al., 2021; Schillemans et al., 2021).

Berikut ini daftar pemerintah di kawasan Indonesia Timur yang menyajikan informasi APBD tahun 2017 hingga 2019 pada *website* pemerintah daerah yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 1. APBD Pada Website Pemda Di Kawasan Indonesia Timur

Pada gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat laporan APBD pada website Pemerintah Daerah yang mengindikasikan bahwa provinsi tersebut memberikan akuntabilitas

dan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik dan sebaliknya website Pemerintah Daerah yang tidak ada laporan APBD mengindikasikan bahwa provinsi tersebut tidak atau kurang memberikan akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik. Akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemerintah Daerah di Kawasan Indonesia Timur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena dalam rentang tiga tahun yaitu tahun 2017 hingga 2019 hanya empat dari tiga belas provinsi yang memberikan informasi APBD kepada publik yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Papua Barat belum memberikan informasi mengenai APBD kepada publik.

Isu akuntabilitas dan transparansi saat ini menjadi topik hangat dikalangan masyarakat. Masyarakat tentu memiliki harapan bahwa Pemerintah dapat akuntabel dan transparan. Penggunaan situs web (*website*) merupakan langkah yang tepat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung di dalamnya lebih mudah diakses oleh pengguna informasi. Penggunaan website di lembaga-lembaga publik berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan informasi yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan organisasi mengenai proses, struktur, produk maupun layanan pemerintah, serta menyediakan saluran agar masyarakat dan pemerintah dapat berinteraksi (Fajrianto, 2022).

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan analisis konten digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemerintah sebelum dan saat periode covid-19 pada website pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur. Metode analisis konten merupakan metode yang umum dan banyak digunakan untuk menilai kuantitas dan kualitas informasi yang disebar dan dipublikasikan oleh organisasi swasta dan publik melalui berbagai media. Secara umum, penggunaan analisis konten mengarah pada kriteria/acuan mengenai “ada” atau “tidak ada” informasi dalam media yang dimiliki oleh organisasi. Berdasarkan kriteria tertentu, nilai “2” diberikan jika informasi tersebut ada dan nilai “1” jika tidak ada. Data yang telah dikumpulkan kemudian di uji menggunakan SPSS dengan metode *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk mengetahui perbedaan tingkat akuntabilitas dan transparansi anggaran pada *website* pemerintah daerah.

Adapun beberapa faktor akuntabilitas dan transparansi yang akan diukur berdasarkan indikator tertuang pada Tabel 1 dan Tabel 2

Tabel 1. Indikator Akuntabilitas *Website* Pemerintah Daerah

No	Indikator	Point
1	Apakah terdapat profil website pemerintahan?	2
2	Apakah layanan publik telah dipublikasikan?	2
3	Apakah kinerja pemda telah digambarkan secara efektif dan efisien pada website pemda?	2
4	Apakah informasi program Pemerintah telah disajikan pada website?	2
5	Apakah APBD diungkapkan pada website Pemda?	2

No	Indikator	Point
6	Apakah Alokasi modal telah dipublikasikan secara rinci menurut klasifikasi keuangan di website Pemda?	2
7	Apakah laporan tentang kebijakan akuntabilitas yang dipublikasikan dihadirkan pada website Pemda?	2
8	Apakah pengeluaran bruto telah dipublikasikan secara rinci menurut klasifikasi keuangan di website Pemda?	2
9	Apakah terjadi kesulitan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran Pemda di website Pemda?	2
10	Apakah mudah dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran di Website Pemda?	2
11	Apakah anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat di website Pemda?	2
12	Apakah penyajian anggaran telah menyertakan periode sebelumnya di website Pemda?	2
13	Apakah tampilan dalam mengevaluasi anggaran hanya membandingkan dengan realisasi sesungguhnya?	2
14	Apakah proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus menerus?	2
15	Apakah laporan pertanggung jawaban anggaran tahunan dipublikasikan tepat waktu?	2

Sumber: Shahib *et al.* (2022)

Tabel 2. Indikator Transparansi *Website* Pemerintah Daerah

No	Indikator	Point
1	Ketersediaan Laporan Keuangan dengan Lengkap	2
2	Ketersediaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	2
3	Ketersediaan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	2
4	Ketersediaan Laporan Operasional (LO)	2
5	Ketersediaan Laporan Arus Kas	2
6	Ketersediaan Laporan Perubahan Modal	2
7	Ketersediaan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
8	Ketersediaan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)	2

Sumber: Shahib *et al.* (2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil ranks dan uji wilcoxon pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 maka dapat dilihat pada bagian akuntabilitas anggaran Pemda sebelum dan saat covid-19, hasil statistik nilai whitung $\leq w_{tabel}$ ($1,50 \leq 17$) dan nilai Asymp. Sig. $0,002 \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa h_0 diterima dan h_a ditolak. Pada bagian transparansi anggaran pemda sebelum dan saat covid-19 diketahui nilai whitung $\leq w_{tabel}$ ($1,00 \leq 17$) dan nilai Asymp. Sig. $0,004 \leq 0,05$, sehingga h_0 diterima dan h_a ditolak.

Tabel 3. Hasil Ranks Uji Wilcoxon

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Daerah Saat Covid-19 - Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Daerah Sebelum Covid-19	Negative Ranks	0	0,00	0,00
	Positive Ranks	12	6,50	78,00
	Ties	1		
	Total	13		
Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah Saat Covid-19 - Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah Sebelum Covid-19	Negative Ranks	1	1,00	1,00
	Positive Ranks	10	6,50	65,00
	Ties	2		
	Total	13		

Sumber: data diolah oleh peneliti (2024)

Tabel 4. Hasil Uji Wilcoxon

Asymp. Sig. (2-tailed)

Akuntabilitas Anggaran Pemda Saat Covid-19 - Akuntabilitas Anggaran Pemda Sebelum Covid-19	0,002
Transparansi Anggaran Pemda Saat Covid-19 - Transparansi Anggaran Pemda Sebelum Covid-19	0,004

Sumber: data diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 3 diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Negative Rank atau selisih antara nilai akuntabilitas untuk sebelum dan saat covid-19 adalah 0, dengan nilai Mean Rank 0,00 dan nilai Sum of Ranks 0,00. Artinya tidak terdapat provinsi yang mengalami penurunan dari sebelum ke saat covid-19
- Positive Rank atau selisih antara nilai akuntabilitas untuk sebelum dan saat covid-19 adalah 12, dengan Mean Rank atau rata-rata peningkatan adalah 6,50. Sedangkan jumlah Sum of Ranks adalah sebesar 76,50. Artinya terdapat dua belas provinsi yang mengalami kenaikan dari sebelum ke saat covid-19
- Ties adalah kesamaan nilai akuntabilitas pada sebelum dan saat covid-19. Dari hasil diatas dapat dilihat nilai Ties adalah 1, artinya terdapat satu provinsi yang memiliki nilai akuntabilitas yang sama pada sebelum dan saat covid-19
- Negative Rank atau selisih antara nilai transparansi untuk sebelum dan saat covid-19 adalah 1, dengan nilai Mean Rank dan Sum of Ranks 1,00.
- Positive Rank atau selisih antara nilai akuntabilitas untuk sebelum dan saat covid-19 dengan Mean Rank atau rata-rata peningkatan adalah 6,50. Sedangkan jumlah Sum of Ranks adalah sebesar 65,00.
- Dari hasil diatas dapat dilihat nilai Ties pada bagian transparansi adalah 2, artinya terdapat 2 provinsi yang memiliki nilai transparansi yang sama pada sebelum dan saat covid-19

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemerintah sebelum dan saat covid-19 pada website

Pemerintah Daerah di Kawasan Indonesia Timur. Nilai menunjukkan rata-rata Provinsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dengan semakin lengkapnya laporan anggaran yang dipublikasi pada website Pemda pada tiga tahun semenjak ditetapkannya pandemi covid-19. Namun terdapat juga Provinsi yang justru mengalami penurunan nilai karena laporan anggaran yang dipublikasi justru kurang lengkap dibandingkan sebelum pandemi covid-19.

Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Sebelum Dan Saat Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Di Kawasan Indonesia Timur

Pada akuntabilitas anggaran Pemerintah, dari tiga belas Provinsi di Kawasan Indonesia Timur ada dua belas Provinsi yang diketahui terdapat perbedaan dan satu Provinsi tidak terdapat perbedaan nilai akuntabilitas pada sebelum dan saat pandemi covid-19. Kemudian dari kedua belas Provinsi yang terdapat perbedaan semuanya mengalami peningkatan nilai akuntabilitas pada sebelum dan saat covid-19. Rata-rata Provinsi mengalami peningkatan setahun setelah pandemi covid terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2021-2022 dimana laporan anggaran yang sebelumnya sangat terbatas di website resmi Pemerintah Daerah mulai mengalami peningkatan seperti mulai dipublikasikannya laporan-laporan seperti APBD tahunan. Dua belas Provinsi yang mengalami peningkatan nilai akuntabilitas tersebut antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Sedangkan, Provinsi Papua Barat tidak mengalami perbedaan nilai akuntabilitas baik sebelum dan saat covid-19, dikarenakan tidak ada laporan anggaran yang di publikasi pada website resmi Pemda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan pada teori stewardship, yaitu tidak terjadi asimetri informasi antara Pemerintah sebagai steward dan masyarakat sebagai principal. Implementasi hasil uji yang telah dilakukan antara akuntabilitas dan teori stewardship memberi makna bahwa Pemerintah sebagai steward yang diberikan amanah oleh masyarakat selaku principal disini tentu harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan cara membuat website resmi Pemda dan menampilkan kinerja, informasi program Pemerintah, APBD, laporan tentang akuntabilitas, laporan terkait perkiraan pengeluaran, dan pengeluaran bruto sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi tersebut. Berdasarkan teori stewardship dapat diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat perbedaan nilai akuntabilitas anggaran Pemerintah pada sebelum dan saat covid-19, dengan rata-rata Provinsi mengalami peningkatan nilai akuntabilitas pada saat terjadinya pandemi covid-19. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah pada saat terjadinya covid-19 berusaha untuk menyampaikan informasi terkait anggaran, kinerja dan informasi program Pemerintah khususnya pada saat pandemi melalui website Pemda, dikarenakan pada saat pandemi Pemerintah Pusat mengeluarkan serangkaian kebijakan khusus, seperti mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan untuk rangka percepatan penanganan dampak covid-19 dan diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk penanganan dampak covid-19 dengan fokus penanganan pada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dengan dipublikasikannya informasi anggaran tersebut pada website pemda maka masyarakat (principal) dapat mengakses informasi secara penuh, mudah, dan terhindar dari asimetri informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rheswari & Akbar, 2022 dalam penelitian berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik", yang menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

Transparansi Anggaran Pemerintah Sebelum Dan Saat Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Di Kawasan Indonesia Timur

Transparansi anggaran Pemerintah sebelum dan saat covid-19 pada website Pemda di Kawasan Indonesia Timur, dari tiga belas Provinsi ada Sebelas Provinsi diketahui terdapat perbedaan nilai transparansi pada sebelum dan saat covid-19. Dari sebelas Provinsi yang terdapat perbedaan nilai transparansi, ada sepuluh Provinsi yang mengalami peningkatan dan satu Provinsi yang mengalami penurunan. Sedangkan terdapat dua Provinsi yang tidak terdapat perbedaan nilai transparansi sebelum dan saat covid-19, karena tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Sepuluh Provinsi yang mengalami peningkatan adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara. Rata-rata Provinsi mulai mempublikasikan laporan anggaran setahun setelah pandemi covid-19 terjadi, laporan anggaran lebih lengkap jika dibandingkan sebelum pandemi terjadi.

Terdapat empat Provinsi yang konsisten melaporkan laporan anggaran mereka ke website resmi Pemda terhitung sejak pandemi covid-19, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku. Berdasarkan indikator penilaian transparansi ke empat Provinsi tersebut melaporkan semua laporan anggaran mulai dari LRA, Neraca, hingga CALK. Namun pada tahun 2022 berdasarkan data yang dikumpulkan, diketahui sepuluh Provinsi sudah mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap ke website resmi Pemda masing-masing.

Provinsi yang mengalami penurunan nilai transparansi adalah Provinsi Papua, hal ini karena Provinsi tersebut hanya sekali mempublikasikan laporan anggaran yaitu LRA pada tahun 2018 dan setelahnya tidak pernah mempublikasikannya lagi di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan Provinsi yang tidak terdapat perbedaan transparansi baik sebelum dan saat covid-19 adalah Provinsi Gorontalo dan Papua Barat. Provinsi Gorontalo hanya satu kali mempublikasikan laporan anggaran pada website resmi pemda sebelum pandemi yaitu pada tahun 2018 dan satu kali saat pandemi yaitu pada tahun 2022. Namun menariknya walaupun hanya mempublikasikan laporan anggaran pada tahun 2018 dan 2022, laporan yang dipublikasi oleh Pemda Gorontalo sangat lengkap berdasarkan indikator penilaian transparansi. Sementara itu, Provinsi Papua Barat tidak mempublikasikan laporan anggaran apapun di website resmi Pemda mereka baik sebelum dan saat pandemi covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan pada teori stewardship. Implementasi hasil uji yang telah dilakukan antara transparansi dan teori stewardship memberi makna bahwa Pemerintah (steward) yang diberikan amanah oleh masyarakat (principal) disini tentu harus mempertanggungjawabkan dengan cara melaporkan dan mempublikasikan informasi terkait anggaran seperti LRA, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan CALK pada website resmi Pemda sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi tersebut. Berdasarkan teori stewardship dapat diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat perbedaan nilai transparansi anggaran Pemerintah pada sebelum dan saat covid-19, dengan rata-rata Provinsi mengalami peningkatan nilai transparansi pada saat terjadinya pandemi covid-19. Laporan anggaran yang dipublikasi pada website Pemda diketahui lebih lengkap pada tiga tahun saat terjadinya pandemi dibandingkan pada tiga tahun sebelum terjadinya pandemi, ini artinya Pemerintah Daerah terus meningkatkan nilai transparansi mereka dari tahun ke tahun dengan mempublikasikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah (steward) kepada masyarakat (principal). Pada tahun 2022 hampir seluruh Provinsi yang ada di Kawasan Indonesia Timur sudah mempublikasikan tujuh komponen utama laporan anggaran pada website Pemda, hal ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan pada tahun 2017 yang tidak terdapat publikasi laporan anggaran dari semua Provinsi yang ada di Kawasan Indonesia Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunardi et al, 2020 dalam penelitian yang berjudul “*Comparison of Transparency Index Between Regency and City in South Sumatra and Lampung Province*”, yang menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan

signifikan indeks transparansi antara kabupaten dengan kotamadya yang terdapat di Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Lampung.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah sebelum dan saat covid-19 pada *website* pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Terdapat perbedaan akuntabilitas anggaran pemerintah sebelum dan saat covid-19 pada *website* pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur, maka dari itu hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap akuntabilitas anggaran pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur sebelum dan saat covid-19 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tiga tahun saat pandemi terjadi pemerintah justru semakin meningkatkan akuntabilitas dengan mempermudah publik untuk mengakses laporan-laporan terkait anggaran di *website* resmi Pemda.
2. Terdapat perbedaan transparansi anggaran pemerintah sebelum dan saat covid-19 pada *website* pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur, maka dari itu hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur sebelum dan saat covid-19 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Pemerintah juga semakin meningkatkan transparansi kepada publik dengan mempublikasi laporan anggaran yang lengkap di *website* resmi Pemerintah sehingga publik dapat mengetahui dengan jelas kinerja Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Fajrianto, F. (2022). Implementasi Peran E-government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 133–140. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1316>
- Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5), 439–454. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Overman, S., Schillemans, T., & Grimmelikhuijsen, S. (2021). A validated measurement for felt relational accountability in the public sector: gauging the account holder's legitimacy and expertise. *Public Management Review*, 23(12), 1748–1767. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1751254>
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2023). *Data Sebaran*. Satuan Tugas Penanganan

Covid-19. <https://covid19.go.id/id>

Schillemans, T., Overman, S., Fawcett, P., Flinders, M., Fredriksson, M., Laegreid, P., Maggetti, M., Papadopoulos, Y., Rubecksen, K., Rykkja, L. H., Salomonsen, H. H., Smullen, A., Verhoest, K., & Wood, M. (2021). Conflictual Accountability: Behavioral Responses to Conflictual Accountability of Agencies. *Administration & Society*, 53(8), 1232–1262. <https://doi.org/10.1177/00953997211004606>

Shahib, H. M., Hasanuddin, M. R., Nurdin, Y., Palete, S., Mika, F., & Rahayu Saputri, R. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Jurnal Transformative*, 8(1), 102–127. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5>

Sunardi, S., Lena, N. M., & Febriantoko, J. (2020). Comparison of Transparency Index Between Regency and City in South Sumatra and Lampung Province. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 15(2), 138–150. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v15i2.2603>